

Pengembangan Sikap Positif Dalam Kesadaran Sosial Untuk Membangun Kohesi Di Masyarakat Society

A. Ramli Rasjid¹, Desty Salsabillah Putri², Nona³, Citra Triana Putri⁴, Keyza Gatji⁵, Puput Amelia⁶, Heriyanti⁷, Sarah Safira Yinata⁸

¹ Universitas Negeri Makassar ; ramlirasyid@unm.ac.id

² Universitas Negeri Makassar ; destysalsabillah@gmail.com

³ Universitas Negeri Makassar ; nona61708@gmail.com

⁴ Universitas Negeri Makassar ; citratriana123@gmail.com

⁵ Universitas Negeri Makassar ; keyzagaji@gmail.com

⁶ Universitas Negeri Makassar ; puputamalia2210@gmail.com

⁷ Universitas Negeri Makassar ; heriyantihusen9@gmail.com

⁸ Universitas Negeri Makassar ; saraasafira@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47134/aksiologi.v5i2.271>

Correspondensi: A. Ramli Rasjid

E-mail: ramlirasyid@unm.ac.id

Received: 3-10-2024

Accepted: 11-10-2024

Published: 12-10-2024

Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak. Artikel ini membahas pentingnya pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif dalam masyarakat Indonesia melalui peran pendidikan dan kesadaran sosial. Sikap kewarganegaraan yang positif diperlukan untuk menciptakan warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Pendidikan, baik formal maupun non-formal, memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan. Selain itu, kesadaran sosial yang tumbuh dari interaksi sosial dan pemahaman akan peran individu dalam masyarakat juga menjadi faktor penting. Artikel ini menyoroti berbagai pendekatan pendidikan yang dapat diterapkan, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan multikultural, dan pendidikan berbasis nilai, serta bagaimana masyarakat dapat berkontribusi melalui program-program komunitas untuk meningkatkan kesadaran sosial. Kesimpulannya, pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif memerlukan kolaborasi antara sistem pendidikan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dan kesadaran sosial.

Keywords : Warganegara; Masyarakat; Pendidikan

Abstrak. This article discusses the importance of developing positive citizenship attitudes in Indonesian society through the role of education and social awareness. Positive citizenship attitudes are needed to create citizens who actively participate in national and state life and are committed to the values of democracy, human rights, and social justice. Education, both formal and non-formal, plays a central role in instilling citizenship values. In addition, social awareness that grows from social interaction and an understanding of the role of individuals in society are also important factors. This article highlights various educational approaches that can be applied, such as citizenship education, multicultural education, and value-based education, as well as how society can contribute through community programs to increase social awareness. In conclusion, developing positive citizenship attitudes

requires collaboration between the education system and active community participation in instilling citizenship values and social awareness.

Keywords: *Citizen; Society; Education*

Pendahuluan

Sikap kewarganegaraan menurut **Barnard (1938)** yang positif merupakan aspek penting dalam pembangunan sebuah negara, termasuk di Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Indonesia memerlukan warga negara yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya, serta mampu berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Pendidikan memegang peran sentral dalam membentuk sikap kewarganegaraan yang positif. Melalui pendidikan formal, seperti mata pelajaran Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), dan sejarah nasional, siswa diajarkan tentang nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Di luar pendidikan formal, pengembangan sikap kewarganegaraan juga dapat dilakukan melalui program-program non-formal, seperti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kepemudaan, dan kegiatan sosial di masyarakat.

Kesadaran sosial juga menjadi elemen kunci dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif. Warga negara yang memiliki kesadaran sosial akan lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya dan termotivasi untuk mengambil tindakan yang dapat memberikan dampak positif. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, gotong royong, dan upaya penyelesaian masalah bersama merupakan bentuk nyata dari sikap kewarganegaraan yang positif. Dengan peran pendidikan yang kuat dan kesadaran sosial yang berkembang, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memiliki sikap kewarganegaraan yang positif. Hal ini akan mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan, serta memperkuat integritas nasional di tengah tantangan globalisasi dan perubahan zaman.

Sikap kewarganegaraan yang positif merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang stabil, berkeadilan, dan harmonis. Di Indonesia, negara yang memiliki keberagaman budaya, agama, dan etnis, pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif menjadi semakin penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, tetapi juga partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, penghargaan terhadap perbedaan, serta kontribusi terhadap kesejahteraan bersama.

Pendidikan dan kesadaran sosial memiliki peran vital dalam membentuk dan mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif. Melalui pendidikan, generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan keadilan. Sistem pendidikan yang baik mampu menanamkan pemahaman mendalam

tentang pentingnya tanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dan sadar akan hak dan kewajibannya. Kurikulum yang mencakup pendidikan kewarganegaraan, sejarah bangsa, dan pendidikan Pancasila berperan besar dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong.

Selain pendidikan formal, kesadaran sosial yang berkembang melalui interaksi masyarakat juga berperan dalam pembentukan sikap kewarganegaraan. Masyarakat yang peka terhadap isu-isu sosial, seperti ketidakadilan, kemiskinan, dan ketimpangan, cenderung lebih responsif terhadap tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Keterlibatan dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, aksi solidaritas, dan diskusi publik, membantu individu mengembangkan empati dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, penguatan sikap kewarganegaraan yang positif membutuhkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan media. Dengan sinergi yang baik, diharapkan masyarakat Indonesia dapat terus menjaga persatuan, memelihara nilai-nilai demokrasi, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. **Pada tahun 1993 Robert D. Putnam** (Sosiologi Politik) Dalam bukunya *Bowling Alone*, Putnam mengemukakan bahwa kepercayaan dan keterlibatan dalam aktivitas sosial berkontribusi terhadap modal sosial, yang merupakan dasar penting untuk kohesi masyarakat. Sikap positif seperti kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi dalam jaringan sosial dianggap memperkuat kohesi sosial. Modal sosial yang kuat mendorong orang untuk terlibat lebih aktif dalam komunitas mereka, membangun jaringan sosial yang luas, dan meningkatkan kohesi sosial secara keseluruhan.

Metode Penelitian

1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif akan membantu peneliti memahami secara mendalam bagaimana pendidikan dan kesadaran sosial memengaruhi sikap kewarganegaraan individu di Indonesia, dengan fokus pada pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Menurut **Paulo Freire pada tahun 2001** Pendidikan Kesadaran Kritis “kesadaran sosial tumbuh melalui dialog dan refleksi kritis”. Ia menekankan pentingnya dialog antar individu dalam masyarakat untuk menyadari ketidaksetaraan sosial dan membangun kohesi melalui pemahaman bersama. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menggali pengalaman subjektif, memperhatikan narasi individu dalam menghadapi kenyataan sosial

a. Studi Kasus

Winkel (1991): Memahami individu secara mendalam, terutama dalam penyesuaiannya dengan lingkungan.

Tujuan Studi kasus bertujuan untuk memahami dinamika spesifik dalam konteks tertentu, misalnya bagaimana sekolah atau program pendidikan tertentu berhasil mengembangkan sikap kewarganegaraan positif.

Subjek Penelitian Sekolah-sekolah

yang telah mengimplementasikan program pendidikan kewarganegaraan, organisasi masyarakat, atau lembaga pendidikan informal.

Proses Peneliti dapat mengamati bagaimana program tersebut diterapkan, apa tantangan yang dihadapi, dan bagaimana program tersebut diterima oleh peserta didik atau anggota masyarakat.

Pengumpulan Data Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dapat dilakukan dengan para guru, siswa, dan pengelola program.

b. Wawancara Mendalam

Tujuan Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan sikap individu secara rinci.

Partisipan Guru pendidikan kewarganegaraan, siswa, pembuat kebijakan, aktivis sosial, dan orang tua. Partisipan dipilih berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam proses pendidikan atau kegiatan yang menumbuhkan kesadaran sosial.

Teknik Wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap membuka ruang untuk eksplorasi topik lebih lanjut berdasarkan jawaban partisipan.

Contoh Pertanyaan :

- Bagaimana Anda mendefinisikan sikap kewarganegaraan yang positif?
- Bagaimana pendidikan di sekolah membantu siswa memahami peran mereka sebagai warga negara?
- Apa peran kesadaran sosial dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan di lingkungan Anda?

• Metode Studi Kasus

Studi kasus akan mengkaji bagaimana peran pendidikan dan kesadaran sosial membentuk sikap kewarganegaraan dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini dapat berfokus pada sekolah-sekolah tertentu, komunitas, atau lembaga pendidikan yang berusaha mengembangkan nilai-nilai kewarganegaraan positif.

• Wawancara Mendalam

Wawancara dapat dilakukan dengan guru, siswa, tokoh masyarakat, serta para ahli dalam pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran sosial. Tujuannya adalah untuk menggali perspektif mereka terkait peran pendidikan dalam membentuk sikap kewarganegaraan.

• Observasi Partisipatif

Menurut **Veny Ari Sejati; 2019**, pengumpulan data melalui observasi partisipatif sebagai partisipan yang memoderasi bentuk komunikasi antarbudaya dari pelajar International Embassy English Brighton berfokus pada perilaku verbal dan nonverbal, sikap, atau persepsi orang-orang dari budaya dan latar belakang sains dan bahasa yang berbeda. Observasi langsung di sekolah atau komunitas yang aktif dalam program pendidikan kewarganegaraan atau kesadaran sosial untuk melihat bagaimana proses pembelajaran dan kegiatan sosial diterapkan.

2. Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran sikap kewarganegaraan dengan menggunakan alat statistik untuk melihat pola, hubungan, dan kecenderungan pada sampel yang lebih besar. Pada tahun 1993 **Robert D. Putnam (Sosiologi Politik)** Putnam, dalam bukunya *Bowling Alone*, membahas tentang penurunan modal sosial dan bagaimana sikap positif dalam partisipasi sosial dapat meningkatkan kohesi masyarakat. Pendekatan kuantitatif sering digunakan untuk mengukur keterlibatan sosial individu dan dampaknya terhadap kohesi sosial. Putnam berpendapat bahwa kepercayaan dan keterlibatan dalam komunitas memiliki hubungan yang kuat dengan sikap positif yang mendukung kohesi.

- Survei atau Kuesioner

Menurut Dede Kusnadi & Aisyah Fitri Islami Tahun 2018 Keberhasilan sebuah perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan salah satu faktornya ditentukan oleh mutu pelayanan yang diberikan, dimana pelayanan yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan pelanggan, yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Kuesioner dapat disebarkan kepada siswa, guru, atau masyarakat umum untuk mengukur tingkat kesadaran sosial dan sikap kewarganegaraan yang dimiliki. Skala Likert bisa digunakan untuk menilai sikap mereka terhadap kewarganegaraan yang positif, seperti toleransi, partisipasi sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

- Analisis Statistik

Data dari survei dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti regresi linier untuk melihat hubungan antara pendidikan dan sikap kewarganegaraan. Juga bisa digunakan uji korelasi untuk melihat sejauh mana kesadaran sosial memengaruhi sikap kewarganegaraan.

3. Pendekatan Campuran (*Mix Method*)

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian ini (campuran) mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif

Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Misalnya, data kuantitatif dari survei dapat dianalisis secara statistik, dan hasilnya dapat diperdalam dengan wawancara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Pendekatan ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Data kuantitatif memberikan generalisasi pola, sementara data kualitatif memberikan wawasan mendalam.

- **Proses** Peneliti dapat memulai dengan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif, diikuti oleh wawancara mendalam untuk menggali lebih lanjut temuan yang muncul dari hasil survei.
- **Contoh Implementasi** Jika hasil survei menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran sosial, wawancara dapat

digunakan untuk memahami mekanisme yang mendasari hubungan tersebut dari perspektif siswa atau guru.

4. Studi Literatur

Studi literatur Menurut Rosyidhana (2014 : 3) dalam (Rusmawan 2019:104) dapat digunakan untuk meninjau teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sikap kewarganegaraan melalui pendidikan. Ini bisa mencakup tinjauan terhadap kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia serta kajian internasional terkait konsep kesadaran sosial.

- **Tujuan** Untuk meninjau teori dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Peneliti dapat membandingkan bagaimana konsep kewarganegaraan dan kesadaran sosial di Indonesia dengan negara lain
- **Analisis** Menganalisis teori yang sudah ada tentang kewarganegaraan, kesadaran sosial, dan bagaimana pendidikan berperan dalam membentuk kedua hal tersebut. Peneliti juga bisa mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada untuk mendukung kontribusi penelitian baru.

5. Eksperimen Sosial (Jika Diperlukan)

Peneliti dapat merancang sebuah eksperimen yang melibatkan dua kelompok: satu kelompok diberikan pendidikan atau program kesadaran sosial tertentu, sedangkan kelompok kontrol tidak. Hasilnya dapat dilihat apakah ada perubahan dalam sikap kewarganegaraan positif di antara peserta setelah intervensi.

Setiap metode di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian yang lebih spesifik.

- **Tujuan** Untuk melihat secara langsung dampak intervensi pendidikan kewarganegaraan atau program kesadaran sosial terhadap sikap kewarganegaraan.

Metode penelitian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penelitian serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan memilih metode yang tepat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran pendidikan dan kesadaran sosial dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kewarganegaraan yang positif adalah landasan penting bagi pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan harmonis. Di Indonesia, sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, dan agama yang sangat kompleks, mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif adalah kebutuhan yang mendesak. Sikap ini mencakup kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, komitmen pada nilai-nilai kebangsaan, partisipasi dalam proses demokrasi, serta rasa tanggung jawab sosial.

1. Pendidikan sebagai Pilar Utama dalam Pengembangan Sikap Kewarganegaraan yang Positif

Pendidikan memainkan peran kunci dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang positif sejak usia dini. Sistem pendidikan yang efektif mampu memberikan pemahaman mendalam tentang konsep kewarganegaraan dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Di Indonesia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah menjadi mata pelajaran wajib di sekolah, berfokus pada pembentukan moral dan etika kewarganegaraan.

Pendidikan formal di sekolah dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, nilai-nilai Pancasila, serta pentingnya persatuan nasional. Melalui kurikulum ini, siswa belajar tentang:

Pancasila sebagai dasar negara: Nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya gotong royong, toleransi, keadilan sosial, dan keberagaman. Siswa diajarkan untuk menghormati perbedaan dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama.

Sejarah Indonesia: Memahami sejarah perjuangan bangsa sangat penting dalam membentuk identitas nasional. Melalui sejarah, siswa diajarkan tentang pengorbanan para pahlawan, pentingnya kemerdekaan, dan perjuangan untuk mencapai keadilan sosial.

Sistem pemerintahan dan demokrasi: Pendidikan memberikan gambaran tentang bagaimana sistem pemerintahan bekerja, pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum, serta hak-hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga stabilitas demokrasi.

Selain itu, pendidikan non-formal seperti organisasi kepemudaan, pramuka, dan ekstrakurikuler lainnya juga penting dalam membentuk sikap kewarganegaraan yang positif. Kegiatan-kegiatan ini mengajarkan keterampilan kepemimpinan, kerja sama tim, dan tanggung jawab sosial. Organisasi seperti Karang Taruna atau Komunitas Sosial di desa memberikan kesempatan bagi pemuda untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial dan pengambilan keputusan di lingkungan mereka.

2. Kesadaran Sosial sebagai Faktor Penunjang Pengembangan Kewarganegaraan Positif

menurut **Cherniss dan Goleman (2001)** Kesadaran sosial adalah kemampuan individu untuk memahami kondisi sosial di sekitarnya dan berempati terhadap orang lain. Di Indonesia, kesadaran sosial menjadi semakin penting mengingat keragaman yang ada, baik dari segi etnis, agama, maupun budaya. Kesadaran sosial memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan secara harmonis, menghormati perbedaan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

Kesadaran sosial tumbuh melalui pengalaman langsung dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kegiatan gotong royong, yang merupakan budaya tradisional Indonesia, mendorong rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Melalui gotong royong, masyarakat bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam membangun fasilitas umum, membantu tetangga yang membutuhkan, atau menjaga lingkungan.

Selain itu, kegiatan sosial seperti kerja bakti, aksi solidaritas, dan kegiatan keagamaan juga memainkan peran penting dalam mengembangkan kesadaran sosial. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, individu belajar untuk memahami kebutuhan orang lain dan mengembangkan sikap peduli terhadap sesama.

Media massa dan media sosial juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran sosial. Kampanye sosial yang disebarakan melalui platform ini, seperti kampanye anti-korupsi, anti-diskriminasi, atau kesetaraan gender, dapat membantu membentuk sikap kewarganegaraan yang lebih inklusif dan bertanggung jawab. Namun, di sisi lain, media juga dapat menjadi sumber disinformasi yang merusak kesadaran sosial jika tidak dikelola dengan baik.

3. Kolaborasi Antar-Pihak dalam Mengembangkan Sikap Kewarganegaraan yang Positif

Pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif tidak dapat dicapai hanya melalui pendidikan dan kesadaran sosial saja, melainkan membutuhkan kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat sipil, dan media.

Peran Pemerintah menurut Soerjono Soekanto (2002:243) memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif. Misalnya, melalui program pendidikan karakter, kampanye kebangsaan, dan regulasi yang mendukung persatuan nasional. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi diskusi publik dan forum-forum yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat untuk membahas isu-isu kewarganegaraan.

Peran Lembaga Pendidikan: Lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kurikulum yang relevan dan mendukung pengembangan kewarganegaraan. Guru dan pendidik memiliki peran strategis dalam membimbing siswa agar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan yang positif.

Menurut (Safrudin, 2015:15) Peran Keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai kewarganegaraan mulai terbentuk. Orang tua harus menjadi teladan dalam menunjukkan sikap tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hukum, serta toleransi terhadap perbedaan. Pendidikan moral yang ditanamkan dalam keluarga akan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter kewarganegaraan yang kuat.

Peran Media dan Organisasi Masyarakat Sipil Media, baik cetak maupun digital, memiliki kekuatan dalam membentuk opini publik. Dengan memberitakan isu-isu kebangsaan, serta memberikan informasi yang tepat tentang pentingnya partisipasi aktif sebagai warga negara, media dapat mendukung pengembangan sikap kewarganegaraan yang positif. Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM, juga berperan penting dalam mendidik masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memfasilitasi keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial.

4. Tantangan dalam Mengembangkan Sikap Kewarganegaraan yang Positif

Meskipun pendidikan dan kesadaran sosial memiliki peran vital, masih ada berbagai tantangan dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif di Indonesia. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Ketimpangan dalam akses pendidikan Di beberapa daerah, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih terbatas, terutama di daerah terpencil atau tertinggal. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kewarganegaraan.

Pengaruh globalisasi dan media sosial Di era digital, arus informasi yang sangat cepat sering kali diikuti oleh penyebaran disinformasi atau hoaks. Banyak warga yang terpengaruh oleh narasi yang tidak benar, yang dapat merusak pemahaman tentang kebangsaan dan kewarganegaraan.

Kurangnya partisipasi politik Di beberapa daerah, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik seperti pemilu atau musyawarah warga dapat menjadi indikator lemahnya kesadaran kewarganegaraan. Hal ini dapat diakibatkan oleh ketidakpercayaan pada sistem atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterlibatan dalam demokrasi.

Kesimpulan

Mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif di Indonesia memerlukan sinergi antara pendidikan yang berkualitas, kesadaran sosial yang tinggi, serta kolaborasi antara berbagai pihak. Pendidikan formal dan non-formal harus bekerja bersama dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan, sementara keluarga dan masyarakat memainkan peran dalam memperkuat kesadaran sosial. Di tengah tantangan yang dihadapi, komitmen yang kuat untuk membangun sikap kewarganegaraan yang positif adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial di Indonesia.

Artikel ini membahas pentingnya mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif di Indonesia, dan peran utama pendidikan dan kesadaran sosial dalam proses ini. Artikel ini menyoroti bahwa sikap kewarganegaraan yang positif, yang meliputi kesadaran akan hak dan tanggung jawab, komitmen terhadap nilai-nilai nasional, partisipasi dalam demokrasi, dan tanggung jawab sosial, sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan sosial dalam konteks Indonesia yang beragam. Artikel ini menekankan bahwa pendidikan, baik formal maupun nonformal, merupakan pilar utama dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan yang positif. Pendidikan formal melalui mata pelajaran seperti Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan sejarah nasional bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kewarganegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendidikan nonformal melalui organisasi pemuda dan kegiatan masyarakat juga memainkan peran penting. Selain itu, artikel ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran sosial dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan yang positif. Kesadaran sosial memungkinkan individu untuk berempati dengan orang lain, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan berkontribusi untuk kebaikan bersama.

Tradisi seperti gotong royong dan acara sosial menumbuhkan kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab kolektif. Artikel ini juga membahas tantangan dalam mengembangkan sikap kewarganegaraan positif, seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan berkualitas, pengaruh globalisasi dan media sosial, serta rendahnya partisipasi politik di beberapa daerah. Artikel ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk mengatasi tantangan ini dan menumbuhkan sikap kewarganegaraan positif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ardhianto, R. A., Hayadi, B. H., Yusuf, F. A., Pahliana, S., & Rodiyah, S. (2024). Administrasi Pendidikan. *Technical and Vocational Education International Journal (Taveij)*, 4(1), 264-270.
- Cherniss, C., Extein, M., Goleman, D., & Weissberg, R. P. (2006). Emotional intelligence: what does the research really indicate?. *Educational psychologist*, 41(4), 239-245.
- Dede Kurniadi dan Aisyah Fitri Islami, "Perancangan Aplikasi Survei Kepuasan Mahasiswa Berbasis Kuesioner Online", *Jurnal Algoritma*, vol. 15, no. 2, hlm. 43–50, Sep 2018.
- Harahap, A. C. P., & Simarmata, S. W. (2022). Studi Kasus Konseling (Teori Dan Praktis Di Institusi Pendidikan).
- Lumowa, F., Nayoan, H., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar pada Masa Pandemi di Desa Tondei I Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Pramudya, W. (2001). Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, dan Pendidikan Kristen di Indonesia.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon Schuster.
- Ramadhan, M. A., & Sugiyono, S. (2015). Pengembangan sumber dana sekolah pada sekolah menengah kejuruan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 5(3), 340-351.
- Saragih, S. M. (2021). *Peran Orangtua Dalam Menanamkan Kedisiplinan Pada Anak Remaja Di Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Ajaran 2020/2021* (Doctoral dissertation, Universitas Quality).
- Sejati, VA (2019). Penelitian Observasi Partisipatif Bentuk Komunikasi Interkultural Pelajar Internasional Embassy English Brighton, United Kingdom. *Jurnal Sosial Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 20 (1), 21–24.